



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Mei 2017

Halaman: 15

:: ADMINISTRASI PERTANAHAN

Warga Diminta Lapor Jika Luas Tanah Berubah

YOGYAKARTA – Warga Kota Yogyakarta diminta aktif melapor ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setempat jika ada perubahan terhadap luas tanah yang dimiliki. Hal itu untuk memperbaiki basis data penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Kami tengah gencarkan sosialisasi tertib administrasi pertanahan. Tanah warga ataupun tanah pemerintah yang luasannya berubah agar melapor untuk perbaikan sertifikat," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana kemarin.

Dia mengakui, banyak kasus adanya perubahan luas tanah. Seperti akibat pembangunan jalan atau fasilitas umum yang memangkas luas tanah hak milik. Jika tak melapor dan mengubah sertifikat, tagihan PBB tetap sesuai dengan luasan tanah semula.

"Jika warga melakukan perubahan luasan di sertifikat, warga tersebut bisa mengajukan perubahan data untuk pajak bumi dan bangunan. Tentunya, pajak yang dibayarkan bisa berubah sesuai kondisi yang sebenarnya," jelasnya.

Salah satu contohnya di Brontokusuman. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan pendekatan ke pemilik tanah untuk perubahan sertifikat akibat pembangunan jalan.

"Dengan tertib administrasi pertanahan, ada banyak keuntungan yang dapat dirasakan warga. Selain membayar PBB sesuai kondisi yang sebenarnya, aset mereka pun terlindungi," imbuhnya.

Setelah kesadaran warga mulai tumbuh, lanjutnya, pemerintah kota juga akan memperoleh gambaran yang lebih valid mengenai kondisi fasilitas publik dan aset yang dimiliki.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005